

DAFTAR BACAAN

**Buku-Buku:**

Basah, Sjachran, **“Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan”**. Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL 2-3 Mei 1996, Jakarta

Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2003

Erwiningsih, Winahyu, *Hak menguasai negara atas tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Hadjon, Philipus M. Tentang Wewenang, Majalah *“YURIDIKA”*, No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indoensia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2006

Nort, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, **Standar Pelayanan Publik**, Cetakan Pertama, Juli 2009,

Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Nurlinda, Ida, *Monograf Hukum Agraria Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Agraria*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2013

Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1985

Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

Ramelan, Eman, HPL Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, *Yuridika*, Vol. 15, No. 3, Mei-Juni 2000

Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Pren. Media Group, Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pranada Media Group, Jakarta, 2012.

Sitorus, Oloan dan nomadyawati, *Hak Atas Tanah dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Jakarta, 1994

Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Din Indonesia*, Surabaya, 2003

Stroink ,F.A.M., en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. (Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1985),

Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.

Sunindhia dan Ninik Widjijanti, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Sumur Bandung, Jakarta, 1982.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Hak Guna Usaha, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah